**KARENA CORONA, RENCANA PEMBANGUNAN KACAU BALAU**



**Sumber: lombokpost.jawapos.com**

**MATARAM-**Pandemi Korona membuat rencana pembangunan di Kota Mataram kacau balau. “Beberapa program akhirnya tidak bisa terealisasi. Tidak jadi dilaksanakan, padahal penting juga untuk masyarakat,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito, Selasa (31/3). Seluruh proyek terpaksa dibatalkan. Termasuk proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 40 miliar. Yang rencananya digunakan untuk jalan, irigasi, hingga mempermak wajah pantai di Loang Baloq.

Beberapa proyek yang menggunakan DAK semula sudah masuk proses tender. Namun terpaksa dibatalkan. Eko berharap DAK yang tak jadi turun hanya bersifat penundaan. Sehingga ketika kondisi virus Korona menghilang, DAK bisa diturunkan kembali seperti rencana semula. ”Sangat terasa mengganggu program kita. Tapi kita sadari kondisi ini dirasakan secara nasional juga,” ujarnya. Dengan penundaan ini, pemkot tak ada rencana untuk menggunakan dana APBD. Sebagai substitusi pendanaan setelah DAK ditunda. Eko mengatakan, upaya tersebut tidak mungkin dilakukan. Sekarang ini pemkot tengah melakukan rasionalisasi anggaran. Untuk kebutuhan penanganan dan pencegahan virus korona.

Rasionalisasi dilakukan sebab biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan virus Korona hanya sebesar Rp 4 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk persoalan tersebut mencapai Rp 45 miliar. ”Rasionalisasinya menyuluruh. Misalnya dimbil dari perjalanan dinas selama tiga bulan ke depan. Kemudian kebutuhan ATK,” tutur Sekda. Asisten II Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura mengatakan, DAK yang ditunda hanya untuk kegiatan fisik. Sementara DAK di Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan tetap digelontorkan. ”Total DAK itu sekitar Rp 40 miliar. Tapi yang tidak diutak-atik itu di Dikes dan Disdik,” kata Mahmuddin.

Proses tender juga dihentikan untuk proyek menggunakan APBD Kota Mataram. Tahun ini, ada 37 proyek senilai sekitar Rp 59 miliar. Hingga Maret ini ada lima paket proyek yang masuk laman LPSE milik Pemkot Mataram. Empat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Peningkatan jalan di Banda Seraya/Wirasenggala dan Komplek Ahmad Yani. Masing-masing proyek senilai Rp 7,8 miliar dan Rp 2 miliar. Kemudian ada supervisi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dengan nilai proyek Rp 155 juta. Serta pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan paket satu senilai Rp 2,3 miliar. Satu proyek lainnya milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram. Yakni pengadaan truk dobel kabin dan kelengkapannya. Proyek ini dilelang dengan harga Rp 1,7 miliar. ”Seluruhnya dibatalkan itu, berdasarkan surat dari Kemenkeu. Kalau ada yang sudah kontrak sebenarnya bisa berlanjut, tapi ini kan masih lelang, belum ada kontrak,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi mengaku pasrah dengan kebijakan penyetopan proyek DAK. Karena ini merupakan keputusan pemerintah pusat. Tahun ini kata dia, Dispar sendiri mendapat DAK untuk penataan TLB sebesar Rp 3,4 miliar. Namun berhubung ada Korona maka dibatalkan. “Tak hanya di Dispar, di instansi lain juga, kan?” ujar dia. Dengan kondisi ini, maka ia meyakini DAK untuk penataan TLB akan dialokasikan kembali tahun depan. Jika Agustus ini digelontorkan, maka proyek yang akan dikerjakan tidak akan mencapai target. “Tidak bisa capai target kalau tahun ini dikerjakan,” tutur mantan Sekdis BKD ini. **(dit/jay/r3)**

**Sumber Berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/01/04/2020/karena-korona-rencana-pembangunan-kacau-balau/>. Diakses pada tanggal 2 April 2020
2. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/01/04/2020/karena-korona-sejumlah-rencana-pembangunan-mataram-ambyar/> Diakses pada tanggal 2 April 2020

**Catatan Berita:**

Pengalihan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020. Surat tersebut sifatnya sangat segera dan ditujukkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai penerima DAK fisik se-Indonesia yang berbunyi:

“Sehubungan dengan mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis /bidang. Subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosenya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dia atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan surat ini.”